

PENGEMBANGAN DESA WISATA STUDI KASUS DI DESA DASUN, KECAMATAN  
LASEM, KABUPATEN REMBANG

  
3/4/2023

Ulil Albab Alvarely, Ari Subowo, Augustin Rina Herawati  
Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Tourism villages are one of the policies issued by the Government with the aim of improving the welfare and economy of rural communities. The implementation of the development and development of a tourist village has an important role for stakeholders along with the factors that influence it. This study aims to identify and analyze the role of the stakeholders involved and determine the factors that influence the development of the Dasun Tourism Village. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The results of the study show that there are stakeholders involved in the development of the Dasun Tourism Village who act as policy makers, coordinators, facilitators, implementers and accelerators. Factors influencing the development of the Dasun Tourism Village were analyzed from the uniqueness of the location, the involvement of the local community, the financing of tourism activities, the role of the driving force and liaison between institutions. So far the development of the Dasun Tourism Village has minimal involvement of stakeholders from outside the scope of government so that the development process still depends on government intervention and there is an inhibiting factor, namely the financing of tourism activities. Suggestions that can be given are tourism actors collaborating with parties outside the government, so that their roles as facilitators and accelerators can run more optimally according to what has been planned.*

*Keywords : Policy Implementation, The Role of Stakeholder, Tourism Village*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang melimpah. Potensi tersebut jika dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal akan memberikan dampak

yang positif bagi negara ataupun masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan bidang pariwisata yang berhasil dapat membantu dalam tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi di

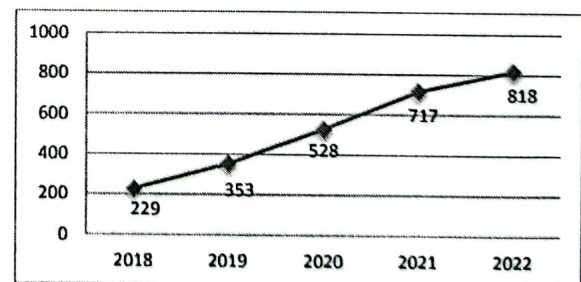
Indonesia sendiri, kesenjangan antara kualitas kehidupan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan masih sangat terlihat jelas.

Kesenjangan yang terjadi dapat dijawab melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah di wilayah pedesaan. Pembangunan perdesaan di Indonesia merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan pembangunan Desa antara lain pemenuhan kebutuhan dasar (seperti meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Salah satu potensi yang dimiliki wilayah perdesaan adalah bentang keindahan alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk pengelolaan yang dilakukan dapat berupa pemanfaatan alam sebagai alternatif di sektor pariwisata. Desa wisata merupakan bentuk pengelolaan kawasan perdesaan yang menjadi tren pengembangan pariwisata alternatif pada satu dasawarsa terakhir. Desa wisata diartikan

sebagai sebuah kawasan perdesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata, misalnya sumber daya alam, kebudayaan, aktivitas wisata dan lain sebagainya.

Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut data dari Kemenparekraf (2021) Indonesia memiliki 75.000 desa dan sekitar 1.200 di antaranya berpotensi menjadi desa wisata. Pertumbuhan desa wisata yang terjadi di Indonesia berjalan selaras dengan yang ada di daerah, salah satu contohnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Menurut data dari buku statistik pariwisata Jawa Tengah yang disusun oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, dari tahun 2018-2022 jumlah desa wisata mengalami pertumbuhan yang signifikan. Statistik desa wisata tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1. Jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah

Sumber: Disporapar Provinsi Jawa Tengah (2022)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Jawa Tengah memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai desa wisata. Kemudian lokus penelitian ini berada di Desa Wisata Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pembangunan desa wisata merupakan program unggulan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Desa Wisata Dasun termasuk dalam kategori desa wisata rintisan yang memiliki beberapa potensi wisata yaitu peninggalan benda cagar budaya, keindahan alam, kuliner, sarana dan prasarana, dan aktivitas wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Jika dilihat dalam sektor pariwisata, desa wisata merupakan bentuk bisnis yang dikelola. Sedangkan mengelola bisnis yang dikolektifkan di tingkat desa masih terbilang sulit. Maka dari itu diperlukan pendekatan serta metode yang tepat agar pengelolaan dan pengembangannya dapat berjalan optimal, baik itu berupa pendampingan dalam tata kelola manajemen, pengelolaan keuangan, atau pelatihan sumber daya manusia agar siap menerima wisatawan saat sudah menjadi desa wisata. Kemudian ketersediaan fasilitas penunjang desa wisata merupakan komponen wajib untuk tujuan wisata (Paristha *et al.*,

2022). Semakin banyak *stakeholder* yang ikut terlibat, maka akan semakin rumit pula dalam pembagian tugasnya. Kesenjangan serta tumpang tindih atas tugas dan juga tanggung jawab masing-masing *stakeholder* masih sering dijumpai, apalagi dalam pengembangan desa wisata yang masih dalam kategori rintisan, tentu saja masih mengalami kebingungan.

Pengembangan desa wisata yang selama ini dilakukan berdasarkan analisis dari penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa keterlibatan serta peran *stakeholder* merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan desa wisata yang ideal dilakukan oleh beberapa *stakeholder*, misalnya sektor pemerintahan, swasta, masyarakat atau organisasi/lembaga pendukung lainnya. Kegiatan mengelola desa wisata sangat erat kaitannya dengan pihak-pihak tertentu yang memberikan kepentingan dan pengaruh. Kemudian dalam implementasi pengembangan desa wisata juga berhubungan langsung dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan tersebut, baik faktor pendorong atau faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Dasun. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam

pengembangan Desa Wisata Dasun, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengembangan Desa Wisata Dasun.

Teori pertama yang digunakan adalah teori peran *stakeholder* menurut Nugroho (2014), *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. *Coordinator* yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
3. *Facilitator* yaitu *stakeholder* sebagai *facilitator* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. *Implementer* yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. *Accelerator* yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Kemudian teori kedua menurut Janet dan Andrea (2012) dalam Putri (2013),

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan desa wisata antara lain :

1. Keunikan lokasi, merupakan daya tarik utama yang menyebabkan terjadinya aktivitas pariwisata dalam suatu desa. Keunikan dari lokasi ini biasanya berupa daya tarik potensi yang dimiliki seperti sumber daya alam, sejarah dan kebudayaan setempat.
2. Keterlibatan masyarakat lokal, merupakan salah satu aspek pendukung yang penting dalam keberlangsungan desa wisata. Keterlibatan masyarakat tersebut sebagai bentuk dukungan dari masyarakat untuk kebijakan atau program yang telah dibuat.
3. Pembiayaan aktivitas wisata, merupakan sumber daya anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan desa wisata.
4. Peran tokoh penggerak, merupakan individu atau suatu kelompok yang memiliki peran dan kepentingan besar dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut turut terlibat secara langsung dalam usaha pengembangan desa wisata.
5. *Link* antar lembaga, merupakan hubungan yang dijalin antar *stakeholder* yang terlibat dimana mereka memiliki andil yang cukup besar dalam proses pengembangan desa wisata.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Situs penelitian berada di Desa Wisata Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Subjek dalam penelitian adalah pihak yang dirasa kompeten untuk memberikan jawaban terkait informasi yang dibutuhkan, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Lasem, Pemerintah Desa Dasun, BUMDes Karya Bahari dan Masyarakat Desa Dasun. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Kemudian kualitas data didapatkan dengan teknik triangulasi serta data penelitian tersebut dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* merupakan proses yang dilakukan dalam mengetahui *stakeholder* atau pihak yang dapat memberikan dampak serta pengaruh terhadap suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

#### 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai *stakeholder* kunci memiliki kepentingan dalam membuat kebijakan teknis terkait dengan bidang kebudayaan dan pariwisata terutama desa wisata. Dinbudpar memiliki kewenangan dalam membuat suatu regulasi atau ketetapan terhadap desa mana saja yang layak dan pantas untuk menyandang sebagai desa wisata. Seiring berjalannya waktu, kepentingan dari Dinbudpar akan dapat memberikan dampak kepada tingkat kenaikan jumlah desa wisata dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rembang terutama di Desa Wisata Dasun. Kemudian pengaruhnya yaitu mengintervensi dalam bentuk memberikan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Desa Wisata Dasun. Peningkatan sarana dan prasarana ini penting untuk menjadi fokus sebagai salah satu upaya mendasar dalam pengembangan desa wisata, sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Dasun.

#### 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai *stakeholder* primer berkewajiban dalam melakukan pengembangan serta penataan kawasan perdesaan. Dengan adanya tugas dan

tanggungjawab tersebut, Desa akan memiliki sistem kontrol yang jelas dari pihak Pemerintah. Kemudian tidak hanya memiliki kepentingan dan kewenangan secara garis hierarki kedudukan dan kekuasaan, Dinpermades juga memberikan pengaruh atau dampak yang jelas dan positif dalam pengembangan Desa Wisata Dasun, dimana dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang membuat desa tersebut maju secara mandiri. Dengan adanya pengaruh yang diberikan secara langsung tersebut, diharapkan masyarakat dan desa dapat menerima dan mengimplementasikannya secara tepat dalam pengembangan desa wisata.

### 3. Kecamatan Lasem

Kecamatan Lasem sebagai *stakeholder* primer selama pengembangan desa wisata ini bergerak sebagai *coordinator* dalam proses koordinasi yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Selain itu, Kecamatan Lasem juga memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dari setiap kegiatan yang ada, sehingga proses pengembangan Desa Wisata Dasun dapat berjalan lebih baik kedepannya. Kemudian pengaruh yang diberikan Kecamatan Lasem adalah memberikan iklim koordinasi yang positif antar *stakeholder*

yang terlibat. Melalui proses koordinasi yang baik, maka penyaluran informasi dan proses kerja akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Kecamatan Lasem juga memfasilitasi pihak Pemerintah Desa Dasun dalam mengadakan musyawarah desa sebagai media untuk berdiskusi dengan harapan koordinasi akan terus terjalin dan pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama seluruh *stakeholder*.

### 4. Pemerintah Desa Dasun

Pemerintah Desa Dasun sebagai *stakeholder* kunci memiliki kepentingan yang dapat dilihat dari Kepala Desa yang telah menuangkan pemikiran serta inisiasi dalam perencanaan bagaimana desa wisata tersebut akan dibangun kedepannya. Pemikiran dan perencanaan tersebut disusun Kepala Desa melalui Visi dan Misi saat berkontestasi di Pemilihan Kepala Desa sehingga harus diwujudkan sebagai Desa Wisata Dasun yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian Pemerintah Desa Dasun jelas memberikan pengaruh yang sangat besar, dimana dari pemikiran serta inisiasi yang dituangkan dalam perencanaan desa wisata dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan

masyarakat desa agar tercapainya kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Dasun.

#### 5. BUMDes Karya Bahari

BUMDes Karya Bahari sebagai *stakeholder* primer dalam keberlangsungan pengembangan desa wisata memiliki kepentingan yang sangat besar, dimana BUMDes Karya Bahari ini ditunjuk oleh Pemerintah Desa Dasun sebagai *pilot project* atau *pioneer* dari Desa Wisata Dasun itu sendiri. Kepentingan tersebut yang mendasari BUMDes Karya Bahari memiliki kekuatan serta kewenangan secara menyeluruh untuk mengembangkan Desa Wisata Dasun menjadi lebih baik kedepannya. Kemudian pengaruh dari BUMDes Karya Bahari ini dapat dilihat dari langkah BUMDes dalam mengelola usaha yang ada di desa untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Dasun.

#### 6. Masyarakat Desa Dasun

Masyarakat Desa Dasun sebagai *stakeholder* sekunder sejauh ini memiliki keterlibatan dan posisi yang penting dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Dasun, tetapi dalam implementasinya tidak memiliki kewenangan sebesar *stakeholder*

lainnya seperti pihak dari pemerintahan. Meskipun begitu, masyarakat tetap berkontribusi dalam membantu serta mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Dasun mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi di lapangan.

#### B. Peran *Stakeholder*

Peran *stakeholder* dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan teori peran dari Nugroho yang membagi dalam lima peran, yaitu sebagai *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer* dan *accelerator*.

##### 1. *Policy Creator*

*Stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemerintah Desa Dasun.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai *policy creator* membuat kebijakan dalam penetapan Desa Dasun sebagai desa wisata yang tertuang dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 556/0121/2021 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Rembang serta membuat program dalam menjalankan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku pariwisata di Desa Wisata Dasun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam hal ini juga membuat program dalam menjalankan pembinaan dan pelatihan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Dasun. Kemudian Pemerintah Desa Dasun membuat kebijakan dan program yang berhubungan dengan Desa Wisata Dasun serta menetapkan lembaga pelaku pariwisata sebagai unit pembantu dalam pengembangan Desa Wisata Dasun.

## 2. *Coordinator*

*Stakeholder* yang berperan sebagai *coordinator* dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Lasem, Pemerintah Desa Dasun dan BUMDes Karya Bahari.

Proses koordinasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan Desa Wisata Dasun. Kegiatan koordinasi tersebut telah dilaksanakan oleh semua pihak atau *stakeholder* yang terlibat. Proses serta mekanisme dalam melakukan koordinasi selama ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya dilakukan dalam satu arah saja dan harus ada timbal balik yang saling berkomunikasi. *Stakeholder* yang memiliki peran sebagai

*coordinator* dalam pengembangan Desa Wisata Dasun harus menjalin hubungan yang baik antar pihak yang terlibat, hal ini dilakukan agar proses koordinasi dapat berjalan dengan optimal. Koordinasi yang dilakukan seluruh *stakeholder* juga telah memberikan pengaruh dan dampak yang positif terhadap proses pengembangan Desa Wisata Dasun.

## 3. *Facilitator*

*Stakeholder* yang berperan sebagai *facilitator* dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Lasem dan Pemerintah Desa Dasun.

*Stakeholder* dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Lasem dan Pemerintah Desa Dasun memberikan peran yang sama sebagai *facilitator* yaitu memfasilitasi desa dan masyarakat termasuk pelaku pariwisata dalam menyediakan kebutuhan yang terkait dengan pengembangan desa wisata. Selain itu juga *stakeholder* sebagai *facilitator* memfasilitasi dalam mengadakan forum diskusi atau



musyawarah terkait dengan pengembangan Desa Wisata Dasun. Kemudian Pemerintah Desa Dasun juga memberikan fasilitas dalam bentuk fisik. Fasilitas ini diberikan kepada BUMDes dalam bentuk membangun sarana dan prasarana pendukung desa wisata untuk dikelola.

#### 4. *Implementer*

*Stakeholder* yang berperan sebagai *implementer* dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Dasun, BUMDes Karya Bahari dan Masyarakat Desa Dasun.

Pemerintah Desa Dasun dan BUMDes Karya Bahari dalam implementasi Desa Wisata Dasun melaksanakan seluruh kebijakan dan program yang telah dibuat oleh *stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* dalam pengembangan Desa Wisata Dasun bersama dengan pelaku pariwisata lainnya termasuk masyarakat Desa Dasun sebagai unit pembantu di lapangan. Implementasi yang dilakukan sejauh ini tetap mendapatkan pengawasan serta evaluasi dari *stakeholder* lainnya agar tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai secara baik dan optimal.

#### 5. *Accelerator*

*Stakeholder* yang berperan sebagai *accelerator* dalam penelitian ini adalah

Pemerintah Desa Dasun bersama dengan BUMDes Karya Bahari.

Pemerintah Desa Dasun sejauh ini mengalokasikan dana desa yang ada untuk keperluan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Dasun serta membangun sarana dan prasarana pendukung untuk keberlangsungan Desa Wisata Dasun. Sedangkan BUMDes Karya Bahari membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari pengelolaan potensi yang dimiliki Desa Wisata Dasun dan membantu melaksanakan program atau kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Dasun.

#### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Dasun

Faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan Desa Wisata Dasun dianalisis berdasarkan teori dari Janet dan Andrea yang menyebutkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengembangan desa wisata, yaitu keunikan lokasi, keterlibatan masyarakat lokal, pembiayaan aktivitas wisata, peran tokoh penggerak dan *link* antar lembaga.

##### 1. Keunikan Lokasi

Keunikan lokasi menjadi faktor pendorong dalam pengembangan Desa

Wisata Dasun karena Desa Dasun secara umum memiliki beberapa potensi wisata berupa peninggalan benda cagar budaya, keindahan sumber daya alam, kuliner khas, sarana dan prasarana pendukung, dan aktivitas wisata yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Desa Wisata Dasun.

## 2. Keterlibatan Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor pendorong karena masyarakat Desa Dasun memiliki peran dan posisi yang penting mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengembangan desa wisata di lapangan, sehingga proses pengembangan ini menerapkan konsep dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

## 3. Pembiayaan Aktivitas Wisata

Pembiayaan Aktivitas Wisata menjadi faktor penghambat karena sumber daya anggaran yang ada sejauh ini hanya mengandalkan alokasi dana dari pemerintah dimana kebutuhan dari masyarakat yang dinamis sehingga tidak dapat terfokus dalam desa wisata saja, sehingga dalam implementasinya tetap membutuhkan bantuan anggaran atau kontribusi dari pihak luar pemerintahan, tetapi sampai saat ini belum ada kerja sama yang dilakukan secara

berkelanjutan yang datang ke Desa Wisata Dasun.

## 4. Peran Tokoh Penggerak

Peran tokoh penggerak menjadi faktor pendorong karena tokoh penggerak tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan masyarakat lain untuk lebih berkontribusi terhadap pengembangan desa wisata. Peran tokoh penggerak berasal dari Kepala Desa Dasun dan sumber daya manusia yang tergabung dalam BUMDes Karya Bahari juga telah memberikan kontribusi dan pengaruh yang signifikan sampai saat ini.

## 5. *Link* Antar Lembaga

*Link* antar Lembaga menjadi faktor pendorong karena hubungan dan koordinasi sejauh ini telah dijalin secara baik dan berkelanjutan antar *stakeholder* yang terlibat, hal ini merupakan langkah penting yang dilakukan untuk menyatukan serta mengintegrasikan kepentingan dan tujuan yang dimiliki setiap *stakeholder* agar menjadi satu pandangan yang sama dalam pengembangan Desa Wisata Dasun.

## KESIMPULAN

Pengembangan Desa Wisata Dasun menjadi salah satu sektor penting yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Desa

Dasun dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Dasun. Keterlibatan *stakeholder* merupakan bagian terpenting dalam proses pengembangan desa wisata. *Stakeholder* yang terlibat antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Lasem, Pemerintah Desa Dasun, BUMDes Karya Bahari dan Masyarakat Desa Dasun yang berperan sebagai *policy creator, coordinator, facilitator, implementer* dan *accelerator*.

Selain peran dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Dasun antara lain keunikan lokasi, keterlibatan masyarakat lokal, pembiayaan aktivitas wisata, peran tokoh penggerak dan *link* antar lembaga.

Hasil penelitian menemukan bahwa *stakeholder* yang terlibat masih didominasi dari unsur Pemerintah serta sedikit keterlibatan secara berkelanjutan dari pihak luar seperti swasta dan sejenisnya, sehingga peran sebagai *facilitator* dan *accelerator* menjadi tidak dapat berjalan dengan lebih optimal. Kemudian terdapat keterkaitan dengan faktor yang mempengaruhi yaitu pembiayaan aktivitas wisata sebagai faktor penghambat. Dapat diketahui jika terdapat

keterlibatan *stakeholder* diluar pemerintah maka akan dapat membantu dalam pemberian fasilitas penunjang dan upaya percepatan, efektivitas dan efisiensi pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan lebih optimal.

## SARAN

1. Pemerintah Desa Dasun dan BUMDes Karya Bahari sebagai pelaku pariwisata dapat menjalin kerja sama dengan *stakeholder* diluar pemerintahan, yaitu pihak swasta. Kerja sama yang dijalin secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu pembangunan dan pengembangan desa wisata dalam aspek finansial. Anggaran yang diandalkan dari pemerintah dalam implementasinya cukup sulit untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada, oleh karena itu keterlibatan dari pihak swasta yang secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu upaya percepatan, efektivitas, serta efisiensi dalam pengembangan Desa Wisata Dasun sesuai dengan target yang telah direncanakan.
2. Meskipun posisi dan peran masyarakat dalam proses pengembangan Desa Wisata Dasun turut dilibatkan secara aktif, masyarakat diharapkan dapat memiliki inisiatif yang tinggi dalam keterlibatannya

untuk membantu pembangunan desa wisata yang ada. Bukan hanya mengikuti arahan dari pengelola pariwisata, tetapi juga dapat membantu untuk berinvestasi sebagai penunjang keberlangsungan pengembangan desa wisata. Karena pada dasarnya pembangunan dan pengembangan desa wisata ini memegang prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat serta pengembangan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa Dasun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Disporapar Provinsi Jawa Tengah. (2022). Draft Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka.
- Hemas Prabawati Jakti Putri, A. M. (2013). Faktor – Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata di Dataran Tinggi Dieng. *Jurnal Teknik PWK*, 2(3), 559–568.
- Janet, K. H., & Andrea, G. (2012). Community-based tourism and local culture: the case of the amaMpondo. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 10(1), 173–188. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2012.10.017>
- Keputusan Bupati Rembang Nomor 556/0121/2021 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Rembang.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Paristha, N. P. T., Arida, I. N. S., & Bhaskara, G. I. (2022). Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(2), 625. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p13>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.